

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP
PRAKTIK AKAD *IJARAH* GEDUNG BESERTA MESIN PRODUKSI BERAS DI
DESA SUMBERAGUNG KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN
JOMBANG**

SKRIPSI

Oleh:

Lusyana Wahyuningtias

NIM.C92217087



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES)

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lusyana Wahyuningtias

Nim : C92217087

Fakultas/Jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis *Ijarāh* dan Fatwa DSN MUI No:112/DSN-MUI/IX/2017
Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Gedung Beserta Mesin Produksi
Beras di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 07 April 2021

Saya yang menyatakan,



Lusyana Wahyuningtias

NIM. C92217087

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Lusyana Wahyuningtias NIM.C92217087 ini telah diperiksa dan disahkan untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 April 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final vertical stroke on the right side.

Dr. H. Mohammad Arif, MA

NIP.197001182002121001

PENGESAHAN

Skripsi yang disusun dan ditulis oleh Lusyana Wahyuningtias Nim C92217087 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syariah.

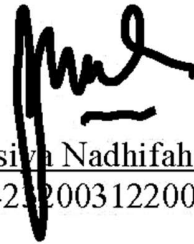
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Dr. H. Mohammad Arif, MA.
NIP.197001182002121001

Penguji II,



Dr. Nurul Asiyah Nadhifah, MHI.
NIP.197504212003122001

Penguji III,



Dr. H. Mohammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP.197307262005011001

Penguji IV,



Elly Uzlifatul Jannah, MH.
NIP.199110032019032018

Surabaya, 17 Juni 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



H. Msruhan, M.Ag
NIP.1959041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Lusyana Wahyuningtias
NIM : C92217087
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : lusyana.tias@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

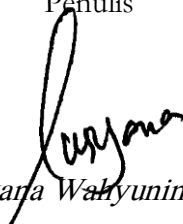
**ANALISIS FATWA DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP PRAKTIK
AKAD *IJARAH* GEDUNG BESERTA MESIN PRODUKSI BERAS DI DESA
SUMBERAGUNG KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Juli 2021
Penulis


(Lusyana Wahyuningtias)

misalnya: dalam hal jual beli, pinjam-meminjam, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Baik untuk memenuhi kepentingannya sendiri ataupun untuk kemaslahatan bersama.

Tujuan utama *muamalah* (hubungan antar manusia) adalah untuk menjaga hartanya agar tidak disalahgunakan oleh orang lain serta untuk menciptakan hubungan yang baik sesama manusia.¹ Karena dalam ber-*muamalah* (hubungan antar manusia) terdapat sifat untuk saling tolong menolong, yang dalam Islam sangat dianjurkan untuk memiliki sifat tersebut. Sebagaimana tercantum dalam dalam Al-Quran surah Al-Maidah (5) ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah:2)²

Dalam Islam objek *muamalah* (hubungan antar manusia) sangatlah luas, hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi umatnya untuk melakukan berbagai bentuk *muamalah* (hubungan antar manusia) yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya, dengan syarat bentuk *muamalah* (hubungan antar manusia) tersebut tidak keluar dari prinsip yang ditentukan oleh

¹ Muh Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 5.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004), 107.

Islam.³ Diantara banyaknya aspek ber-*muamalah* (hubungan antar manusia) sewa menyewa merupakan salah satu kerjasama yang peranannya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Misalnya: sewa menyewa tanah, sewa menyewa mobil, sewa menyewa gedung, sewa menyewa rumah dan masih banyak lagi.

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bidang *muamalah* (hubungan antar manusia) adalah akad *ijarāh* (sewa menyewa). Kududukan akad sangat penting dalam ber-*muamalah* (hubungan antar manusia), akad menjadi kunci antara hak dan kewajiban.⁴ Akad dibuat oleh para pihak untuk dilaksanakan dan dipenuhi bersama bukan untuk dilanggar maupun diabaikan. Hal ini dikarenakan akad memiliki sifat yang sangat mengikat bagi para pihak yang telah membuat perjanjian.⁵

Secara etimologi akad yaitu perjanjian, perikatan, atau kemufakatan. Secara terminologi *fiqh* akad yaitu pernyataan melakukan ikatan (pertalian ijab) dan pernyataan penerima ikatan (qabul) yang sesuai dengan syariat, yang nantinya akan berpengaruh kepada objek perikatan. Adapun yang dimaksud dengan kata-kata “sesuai dengan kehendak syariat” ialah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan kedua belah pihak atau lebih tidak sah apabila tidak sesuai dengan syariat. Dan yang dimaksud dengan kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” ialah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak

³ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 5.

⁴ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: KENCANA, 2017), 3.

⁵ Muh Abdul Wahab, *Teori akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 14.

yang lain. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy akad ialah perikatan antara ijab dan Kabul yang telah dibenarkan syara' dimana telah terdapat kerelaan antara kedua belah pihak.⁶

Dikatakan akad yang sah apabila akad tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad, misalnya akad *ijarāh* atau menyewakan manfaat suatu barang yang harus didasarkan pada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak dan tidak diperbolehkan merugikan diri sendiri dan orang lain. *Ijarāh* (sewa menyewa) adalah salah satu bentuk transaksi *muamalah* (hubungan antar manusia) dalam memenuhi kebutuhan hidup yang bertujuan untuk saling tolong menolong antara sesama, yang dapat menjadi solusi untuk dapat meningkatkan perekonomian manusia yang sesuai dengan syariat Islam.

Pengertian *ijarāh* (sewa menyewa) adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa adanya pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas tersebut.⁷ Dengan demikian, akad *ijarāh* (sewa menyewa) tidak terjadi perpindahan atas kepemilikan objek *ijārah* (sewa menyewa), namun hanya terjadi perpindahan hak pakai dari pemilik yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa tersebut. Pihak yang menyewakan (pemilik manfaat) disebut dengan *mu'ajir*, pihak yang menyewa disebut dengan *musta'jir*, objek sewa disebut dengan *ma'jur*, dan imbalan sewa tersebut disebut dengan *ujrah*.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Premada Media Group,2010),51.

⁷ Muh Syafi'i, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, (Depok:Gema Insani,2017),117.

Baik dalam bentuk sewa menyewa ataupun upah-mengupah, *ijarāh* (sewa menyewa) merupakan bentuk *muamalah* (hubungan antar manusia) yang diperbolehkan, dan tentunya harus sesuai dengan syariat Islam. Adapun dasar hukum dari *ijarāh* (sewa menyewa) terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah swt dan ketahuilah bahwa Allah swt maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah:233).⁸

Ayat tersebut menjelaskan mengenai kebolehan seseorang menyewa jasa orang lain untuk menyusui anaknya, tetapi dengan syarat pembayaran upahnya secara layak. Hal tersebut menunjukkan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban membayar yang patut atas jasa yang diterima.⁹

Adapun akad sewa menyewa atau *ijarāh* (sewa menyewa) yang terjadi di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang adalah akad sewa menyewa gedung beserta mesin produksi beras. Dalam hal ini pemilik gedung beserta mesin produksi merupakan pemilik sah dari gedung tersebut yang terletak di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang dan menyewakan gedung beserta mesin tersebut kepada penyewa. Pihak penyewa

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*,38.

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*,(Surakarta:Muhammadiyah University Press,2017),123.

adalah tengkulak padi yang menyewa gedung beserta mesin dan kemudian menggunakan gedung beserta mesin tersebut hanya 2x dalam setahun untuk memproduksi beras.¹⁰

Sewa menyewa gedung beserta mesin produksi beras merupakan salah satu dari banyaknya jenis sewa menyewa. Latar belakang terjadinya praktik sewa menyewa gedung beserta mesin produksi beras berawal dari masyarakat Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang yang sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Sehingga para tengkulak padi membutuhkan tempat untuk memproduksi beras saat panen tiba. Yang oleh pemilik gedung beserta mesin produksi beras dimanfaatkan dengan baik dengan menyediakan tempat beserta alat produksi beras untuk disewakan.

Namun proses transaksi berawal dengan akad yang tidak jelas dengan *shighat* (ijab qabul) seadanya. Dalam Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad *ijarāh* (sewa menyewa) pada bagian ketiga ayat satu dijelaskan bahwa: (1) Akad *ijarāh* (sewa menyewa) harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh kedua belah pihak yang berakad.¹¹

Contoh: tengkulak berkata kepada pemilik gedung “pak saya menyewa disini” dan oleh pemilik gedung dijawab “iya, biaya sewa Rp 3.000.000 pertahunnya” tanpa adanya kelanjutan penjelasan perjanjian. Yang akhirnya berbuntut pada masalah:

¹⁰ Bapak Bambang (pemilik), *Wawancara*, Jombang, 28 Januari 2021.

¹¹ DSN-MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Ijarah

2. Bagaimana analisis *Ijarāh* dan Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad *ijarāh* gedung beserta mesin produksi beras Di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi mengenai kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan kembali. Hingga saat ini peneliti belum menemukan penulisan skripsi yang membahas mengenai “Analisis Fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad *Ijarāh* Gedung beserta Mesin Produksi Beras di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang”. Berikut merupakan penelitian mengenai sewa menyewa yang dilakukan sebelumnya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh saudari Lady Avisha mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Kandang Ayam Potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan”. Hasilnya dalam hukum positif, praktik akad sewa menyewa kandang ayam potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW (*Burgelick Wetboek*). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama

membahas mengenai akad sewa menyewa.¹³ Sedangkan perbedaannya terletak pada objek akad sewa menyewa dan tujuan akad sewa menyewa. Pada penelitian ini objeknya berupa kandang ayam potong sedangkan objek sewa menyewa yang akan penulis teliti yaitu gedung beserta mesin produksi beras. Pada penelitian ini dijelaskan dengan jelas tujuan dari akad sewa menyewa, yakni untuk mendapatkan ujah yang sekaligus merupakan bentuk pembayaran hutang dari pemberi sewa kepada penyewa, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis yaitu pemilik gedung tidak memberikan ketentuan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh saudara Nur Rohman mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam mengenai Sewa Menyewa Tanah untuk Pembuatan Batu Bata di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto”. Hasilnya, menurut hukum islam terhadap sewa menyewa tanah untuk pembuatan batu bata di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto adalah kurang sesuai. Karena adanya pengambilan materi pada objek sewa sehingga mengalami kerusakan pada zatnya.¹⁴ Adanya kerusakan objek yang ditimbulkan oleh penyewa dilakukan secara jelas. Objek dalam penelitian ini adalah tanah untuk

¹³ Lady Avisha, *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Sewa Menyewa Kandang Ayam Potong di Desa Lawak Ngimbang Lamongan”*,(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya,2019).

¹⁴ Nur Rohman, *”Tinjauan Hukum Islam mengenai Sewa Menyewa Tanah untuk Pembuatan Batu Bata di Desa Ngerowo Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto”*,(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya,2018).

pembuatan batu bata. Sedangkan penulis membahas mengenai akad sewa menyewa.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh saudara Abd. Rahman Arief mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2009 dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Akad Sewa Menyewa Kamar Kost di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya”. Hasilnya, dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen akad sewa menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya melanggar hak penyewa sebagai konsumen.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis adalah sama-sama membahas mengenai akad sewa menyewa. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek akad sewa menyewa.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas, yang nantinya akan dijadikan penulis sebagai acuan dalam menuntaskan penelitian yang sedang dikaji. Persamaan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu akad yang digunakan adalah akad sewa menyewa atau *ijarah* (sewa menyewa). Sedangkan letak perbedaannya pada penelitian ini yaitu penulis lebih membahas mengenai praktik akad sewa menyewa gedung beserta mesin produksi beras di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, dimana pada awal

¹⁵ Abd Rahman Arief, “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Akad Sewa Menyewa Kamar (kost) di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya”,(Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya,2019).

Bab ketiga yaitu membahas mengenai praktik akad sewa menyewa gedung beserta mesin produksi beras di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang. Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, profil gedung produksi beras dan praktik akad sewa menyewa gedung beserta mesin produksi beras.

Bab keempat yaitu membahas mengenai analisis *ijarāh* beserta Fatwa DSN MUI NO.112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad sewa menyewa gedung beserta mesin produksi beras di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, yang meliputi analisis praktik akad sewa menyewa gedung beserta mesin produksi beras dan analisis *ijarāh* dan fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik akad *ijarāh* gedung beserta mesin produksi beras di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat mengenai kesimpulan yang menjawab rumusan masalah serta memberikan saran yang dilengkapi dengan daftar pustaka.

- c. Menurut ulama Malikiyah, *ijarāh* (sewa menyewa) adalah perpindahan kepemilikan manfaat atas sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan kompensasi tertentu.¹
- d. Menurut ulama Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah, *ijarāh* (sewa menyewa) adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi imbalan yang diketahui.
- e. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, *ijarāh* (sewa menyewa) adalah pemilikan suatu manfaat yang diberi imbalan dan syarat-syarat.
- f. Menurut Sayyid Sabiq, *ijarāh* (sewa menyewa) adalah akad yang digunakan untuk mengambil manfaat dengan diberi ganti.
- g. Menurut Hasbi Ash-Shiqqie, *ijarāh* (sewa menyewa) adalah akad yang objeknya dilakukan dengan penukaran manfaat dengan suatu imbalan.
- h. Menurut Idris Ahmad, *ijarāh* (sewa menyewa) adalah mengambil manfaat dari tenaga orang lain dengan cara memberi ganti.²

Dalam Fatwa DSN MUI No.09/DSN-MUI/2000 tanggal 13 April tahun 2000 mengenai pembiayaan *ijarāh* (sewa menyewa), yang dimaksud dengan *ijarāh* (sewa menyewa) adalah pemindahan suatu hak pakai atas barang atau

¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 122.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 115.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu (QS. An-Nisa:29)⁸

Ayat ini menjelaskan mengenai *ijarāh* (sewa menyewa) yang dilakukan dengan paksaan atau dengan cara yang bathil, maka akad *ijarāh* (sewa menyewa) tersebut tidak sah.

- b. Segala hal yang berhubungan dengan objek sewa menyewa harus dijelaskan dengan jelas dan transparan.

Mengenai objek harus jelas barangnya (jenis, sifat dan kadarnya) dan penyewa wajib melihat dan memilih barang yang hendak disewanya serta harus jelas masa sewanya. Besarnya uang sewa sebagai imbalan pengambilan manfaat harus jelas dan diketahui kedua belah pihak yang artinya bukan kesepakatan sepihak. Disamping itu tata cara pembayaran uang sewa harus dijelaskan secara rinci dan berdasarkan kesepakatan bersama.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya...*,84.

- b. Antara kedua belah pihak telah melakukan ijab qabul, lafadznya “*saya menyewa rumah disini*” dan jawabannya “*saya terima atau memperbolehkan anda menyewa rumah ini*”.¹⁰

4. Macam-macam *ijarāh*

Apabila dilihat dari segi objeknya, ulama fiqh membagi akad *ijarāh* (sewa menyewa) menjadi dua macam, yaitu:

- a. *Ijarāh bil ‘amāl*, yaitu akad *ijarāh* (sewa menyewa) terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. Akad *ijarāh* (sewa menyewa) ini dilakukan dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan membayar upah dari pekerjaan yang telah dilakukannya.¹¹ Akad *ijarāh* (sewa menyewa) seperti ini dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) *Ijarāh* (sewa menyewa) yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga.
- 2) *Ijarāh* (sewa menyewa) bersifat serikat seperti seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti buruh pabrik, tukang jahit atau tukang bangunan.

¹⁰ Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 197.

¹¹ Harun, *Fiqh Muamalah...*, 124-125.

Menurut ulama fiqh kedua bentuk *ijarāh* (sewa menyewa) tersebut hukumnya diperbolehkan.¹²

- b. *Ijarāh bil manfaat*, yaitu akad *ijarāh* (sewa menyewa) yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda yang bergerak seperti menyewa kendaraan, maupun benda tidak bergerak seperti sewa menyewa rumah, tokoh, gedung dan lainnya. Apabila manfaat tersebut merupakan manfaat yang diperbolehkan oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan sebagai objek sewa menyewa dan tidak diperbolehkan akad *ijarah* (sewa menyewa) atas manfaat yang diharamkan seperti tidak boleh mengambil imbalan atasnya seperti bangkai dan darah.¹³

5. Sifat dan hukum *ijarāh*

- a. Sifat *ijarāh* (sewa menyewa)

Menurut ulama Hanafiyah akad *ijarāh* (sewa menyewa) adalah akad yang *lazim* (mengikat). Menurut mayoritas (jumhur) ulama, akad *ijarāh* (sewa menyewa) adalah akad *lazim* (mengikat) yang tidak dapat dibatalkan kecuali terdapat hal-hal yang dapat membatalkan akad-akad

¹² Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam...*, 198.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 56.

adalah apabila penyewa mengambil manfaat maka ia berkewajiban membayar upah yang berlaku umum, yaitu tidak boleh melebihi upah yang telah ditetapkan.

Menurut ulama Hanafiyah, upah yang wajib adalah lebih sedikit dari upah umum dan dari upah yang telah ditetapkan. Hukum ini berlaku apabila terjadi ketidakabsahan *ijarāh* (sewa menyewa) yang disebabkan karena adanya syarat yang *fasakh* (batal), bukan karena tidak diketahuinya upah yang telah ditetapkan dan bukan karena tidak adanya penetapan upah.¹⁵

6. Hak dan kewajiban *mu'ajir dan musta'jir* dalam *ijarāh*

Agar praktik akad *ijarāh* (sewa menyewa) dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka terdapat hak yang diperoleh serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh *mu'ajir* (yang menyewakan) dan *musta'jir* (penyewa). Berikut ini dijelaskan mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak dalam akad *ijarāh* (sewa menyewa), yaitu:

a. Hak dan kewajiban bagi *mu'ajir* (yang menyewakan), yaitu:

- 1) *Mu'ajir* (yang menyewakan) berhak menerima *ujrah* (upah/uang sewa).

¹⁵ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat...*, 329.

- 2) *Mu'ajir* (yang menyewakan) berkewajiban untuk menyerahkan barang yang menjadi objek *ijarāh* (sewa menyewa).
 - 3) *Mu'ajir* (yang menyewakan) memberikan izin untuk menggunakan barang yang disewakan kepada *musta'jir* (penyewa).
 - 4) *Mu'ajir* (yang menyewakan) memelihara serta merawat barang yang disewakannya, seperti memperbaiki kerusakan yang ada pada barang tersebut, kecuali jika kerusakannya disebabkan oleh *musta'jir* (penyewa) itu sendiri.
 - 5) Memberikan *musta'jir* (penyewa) kenikmatan atau manfaat atas barang yang disewakan selama berlakunya waktu sewa menyewa.
 - 6) Menerima kembali atas objek sewaan diakhir masa sewa.¹⁶
- b. Hak dan kewajiban bagi *musta'jir* (penyewa), yaitu:
- 1) *Musta'jir* (penyewa) memiliki hak untuk mengambil manfaat dari barang sewaannya (*ma'jur*).
 - 2) *Musta'jir* (penyewa) berkewajiban untuk memberikan *ujrāh* (upah/uang sewa) sebagaimana yang telah ditentukan diawal akad.

¹⁶ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan AusAID, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: kerjasama YLBHI dan PSHK, 2007), 174.

- 3) *Musta'jir* (penyewa) berkewajiban menjaga dan memelihara barang sewaan.
- 4) *Musta'jir* (penyewa) wajib memperbaiki dan bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkannya karena kelalaiannya.
- 5) Mengembalikan barang sewaan apabila telah habis waktu sewanya atau jika terdapat sebab-sebab yang dapat menyebabkan selesainya atau putusannya sewaan.¹⁷

7. Pembayaran upah dan sewa

Islam menganjurkan untuk membayar upah tepat pada waktunya bahkan sebelum keringat pekerja kering. Upah yang diberikan hendaknya memiliki unsur keadilan dan kelayakan, oleh sebab itu besaran upah hendaknya disepakati kedua belah pihak diawal akad.¹⁸ Jika *ijarāh* (sewa menyewa) itu suatu pekerjaan, maka pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika *mu'ajir* (yang menyewakan) menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir* (penyewa), maka ia berhak menerima *ujrah* (upah) karena *musta'jir* (penyewa) sudah menerima kegunaan.

Hadist yang meriwayatkan mengenai upah dalam transaksi *ijarāh* (sewa menyewa), Nabi saw bersabda:

¹⁷ Dr. Idri, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2016), 240.

¹⁸ Nurlina T Muhyiddin, *Ekonomi Bisnis*, (Malang: Penerbit Peneleh, 2020), 27.

Apabila *ijarāh* (sewa menyewa) telah habis masa sewanya maka penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Diantara kewajiban tersebut yang paling penting adalah sebagai berikut:

- a. Jika barang yang dijadikan objek perjanjian adalah barang yang dapat bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikan barang tersebut kepada yang menyewakan/pemilik dengan menyerahkan langsung benda tersebut, misalnya sewa menyewa kendaraan.
- b. Apabila objek sewa menyewa barang yang tidak bergerak maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada yang menyewakan/pemilik dalam keadaan kosong, maksudnya tidak terdapat harta penyewa didalamnya, misalnya dalam perjanjian sewa menyewa rumah, tokoh, ruko dan lain sebagainya.
- c. Apabila yang menjadi objek sewa menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka penyewa harus menyerahkan tanah tersebut kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa didalamnya.²⁰

9. Berakhirnya dan pembatalan *ijarāh*

Akad *ijarāh* (sewa menyewa) dapat berakhir karena sebab *fasakh* (pembatalan). Dengan *fasakh* (pembatalan) kedua pihak yang berakad

²⁰ *Ibid*,123.

tersebut kembali ke status semula sebelum terjadinya akad. Demikian juga dengan objek akad. *Fasakh* (pembatalan) boleh dilakukan apabila terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan ketetapan syariah, boleh juga dilakukan apabila menghilangkan *dharar* (bahaya atau kerugian) untuk menghilangkan perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat.

Beberapa hal yang menjadi penyebab pembatalan dan berakhirnya akad *ijarāh* (sewa menyewa) adalah sebagai berikut:

- a. Objek dalam akad *ijarāh* (sewa menyewa) mengalami kerusakan, hilang ataupun musnah sehingga tidak dapat digunakan lagi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Seperti terjadinya kebakaran rumah yang disewa atau hilangnya kendaraan yang disewa.
- b. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan *musta'jir* (penyewa). Dimana kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian dari *musta'jir* (penyewa) sendiri seperti penggunaan barang yang tidak sesuai dengan peruntukan.
- c. Telah terpenuhinya suatu manfaat dan terwujudnya tujuan yang telah diakadkan. Misalnya pada akad *ijarāh* (sewa menyewa) berakhir dengan habisnya waktu sewa dan selesainya suatu pekerjaan.

- a. Akad *ijarāh* adalah akad antara *mu'jir* (pemberi sewa) dengan *musta'jir* (penyewa) untuk saling mempertukarkan suatu manfaat dengan *ujrah* (upah).
- b. *Mu'jir* (pemberi sewa) adalah pihak yang menyewakan barang. Pihak ini baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- c. *Musta'jir* adalah pihak yang menyewa (penyewa atau penerima manfaat).
- d. *Manfa'ah* adalah manfaat yang bisa diambil dari barang sewaan tersebut.
- e. *Mahall al-manfa'ah* adalah barang sewa atau barang yang dijadikan sarana demi terwujudnya suatu manfaat dalam akad *ijarāh 'ala al-a'yan*.
- f. *Ijarāh 'ala al-a'yun* adalah akad sewa atas suatu manfaat pada barang.
- g. *Ijarāh muntahiyah bi al-tamlīk* (IMBT) adalah akad *ijarāh* (sewa menyewa) atas manfaat suatu barang yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan penyewa.
- h. *Ijarāh maushufah fī al-dzimmah* (IMFD) adalah akad *ijarāh* (sewa menyewa) atas manfaat suatu barang yang pada saat awal akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya namun objek yang disewakan belum ada.

- i. *Ijarāh tasyghiliyyah* adalah akad *ijarāh* (sewa menyewa) atas manfaat pada barang yang tidak disertai dengan suatu perjanjian pemindahan hak milik atas barang sewa kepada si penyewa.
 - j. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan dengan menggunakan akad *ijarāh* (sewa menyewa) agar mendapatkan manfaat atas suatu jasa.
 - k. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki seorang *mu'jir* (yang menyewakan) karena memiliki kedudukan sebagai pemilik.
 - l. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki *mu'jir* (yang menyewakan) karena memiliki kedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik tersebut.²³
2. Ketentuan
- a. Ketentuan terkait dengan hukum dan bentuk *ijarāh* (sewa menyewa)
 - 1) Akad *ijarāh* (sewa menyewa) boleh digunakan dalam bentuk akad *ijarāh 'ala al-a'yun* dan akad *ijarāh 'ala al-a'mall*.
 - 2) Akad *ijarāh* (sewa menyewa) diperbolehkan digunakan dalam bentuk akad *ijarāh tasyghiliyyah*, *ijarāh muntahiyyah bi al-tamlīk* (IMBT), dan *ijarāh maushufah fi al-adzimmah* (IMFD).

²³ *Ibid.*

- 3) *Ujrāh* (upah) dapat dibayar secara tunai, bertahap atau angsur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 - 4) *Ujrāh* (upah) yang telah disepakati kedua belah pihak diperbolehkan untuk ditinjau ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *musta'jir* (penyewa) sesuai dengan kesepakatan diawal.
- h. Ketentuan khusus untuk kegiatan atau produk
- 1) Dalam akad *ijarāh* (sewa menyewa) yang dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan *ijarāh* (sewa menyewa), yang berlaku *dhawabith* dan *hudud* (ketentuan dan batasan) dan juga terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai akad *ijarāh* (sewa menyewa).
 - 2) Dalam akad *ijarāh* (sewa menyewa) yang dipraktikkan menggunakan IMBT, berlaku *dhawabith* dan *hudud* (ketentuan dan batasan) dalam *ijarāh* (sewa menyewa) sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI nomor 27/DSN-MUI/III/2002 mengenai *ijarāh muntahiyyah bi al-tamlīk*.
 - 3) Dalam akad *ijarāh* (sewa menyewa) yang dipraktikkan dalam bentuk pembiayaan multijasa, berlaku *dhawabith* dan *hudud* (ketentuan dan batasan) dalam *ijarāh* (sewa menyewa) sebagaimana terdapat dalam

tidak mengganggu aktifitas warga sehari-hari. Namun sangat mudah dijangkau karena letak gedung produksi beras ini dipinggir jalan utama menuju jalan raya.

Jika dilihat dari sejarah berdirinya, gedung ini sudah lama berdiri. Gedung produksi beras ini berdiri pada tahun 1983 yang didirikan oleh bapak Bambang, beliau berumur 63 tahun dengan pendidikan terakhir SMP. Bapak Bambang adalah seorang petani yang sukses. Berdirinya gedung produksi beras ini berawal dari modal pengetahuan, pengalaman dan ketertarikan beliau akan peluang yang menjanjikan dari usaha penyewaan gedung produksi beras ini karena di Desa Sumberagung hanya terdapat dua gedung produksi beras dan satu gedung lainnya letaknya cukup jauh dari area persawahan, sehingga masyarakat membutuhkan ongkos tambah untuk mengangkut beras menuju gedung tersebut. Gedung produksi beras ini memiliki fasilitas atau peralatan sebagai berikut:

1. Gedung
2. 1 (satu) mesin produksi beras
 - a. Model : HW 60 an
 - b. Tipe : Kombinasi rool karpet
 - c. Kapasitas beras perjam : 1000 – 1100 kg/jam
 - d. Kadar air beras : 14%

Namun pada akad tersebut tidak lengkap karena pemilik gedung tidak menjelaskan dan menyebutkan secara detail mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi penyewa, seperti: kewajiban pembayaran uang sewa minimal dua tahun dan penambahan biaya sewa mesin apabila mesin tersebut digunakan. Sehingga penyewa merasa dirugikan karena terpaksa harus membayar uang sewa gedung minimal dua tahun padahal gedung tersebut hanya digunakan saat panen saja yaitu dua kali dalam setahun dan membayar biaya tambahan apabila mesin produksi beras digunakan, padahal mesin tersebut berada dalam gedung yang otomatis telah menjadi fasilitas yang diterima penyewa.

Salah satu syarat yang menjadi sahnya *ijarāh* (sewa menyewa) yaitu segala hal yang berkaitan dengan objek sewa menyewa harus jelas dan transparan, agar tidak terjadi perselisihan. Dan dalam *bermuamalah* (hubungan antar manusia) harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak agar tidak merugikan orang lain.

Dalam melakukan akad tidak diperbolehkan ada unsur penipuan karena akan merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini jelas menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena dalam kesepakatan awal pemilik gedung tidak menyebutkan sama sekali mengenai hal tersebut. Berdasarkan uraian tersebut cara melakukan akad sewa menyewa gedung beserta mesin produksi

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan lembaga yang berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang dipimpin oleh ketua umum MUI. Fungsi utama dari Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariat islam. Untuk keperluan pengawasan, Dewan Syariah Nasional (DSN) membuat garis panduan pada produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini yang akan menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan yang akan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Garis panduan pada produk syariah adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan semua kegiatan dalam lembaga keuangan syariah. Dari sekian banyak fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI, salah satu fatwa yang berkaitan dengan penulis bahas adalah mengenai fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017. Dalam fatwa ini membahas mengenai akad *ijarāh* (sewa menyewa).

Pada bab II penulis telah menjelaskan mengenai pengertian akad *ijarāh* (sewa menyewa), akad *ijarāh* (sewa menyewa) adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut.

Akad yang sah ialah akad yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad, misalnya dalam akad *ijarāh* (sewa menyewa) harus didasarkan dengan persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak dan tidak diperbolehkan merugikan orang lain.

Salah satu syarat yang menjadi sahnya *ijarāh* (sewa menyewa) yaitu segala hal yang berkaitan dengan objek sewa harus jelas dan transparan agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan menjelaskan mengenai manfaatnya dan batasan waktu. Pada kasus sewa menyewa gedung beserta mesin produksi beras di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang mengabaikan syarat sahnya *ijarāh* (sewa menyewa) tersebut yaitu pemilik gedung tidak menjelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi penyewa, seperti: kewajiban pembayaran sewa, penambahan biaya sewa dan penanggung kerusakan apabila terjadi kerusakan.

Dalam akad sewa menyewa gedung beserta mesin produksi beras di Desa Sumberagung Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, yang mana transaksinya sangat singkat tanpa adanya penjelasan yang lengkap dari pemilik gedung dan berbuntut pada masalah:

1. Penyewa diwajibkan untuk membayar penuh biaya sewa minimal dua tahun.

Yang pada praktiknya gedung tersebut hanya digunakan saat panen saja yaitu dua kali dalam setahun.

- Rohman Nur. *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Sewa Menyewa Tanah untuk Pembuatan Batu Bata Desa Ngerawon Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto*. Skripsi: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Rosyadi Imron. *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*. Depok: Kencana, 2017.
- Siyoto Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiarto Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syafi'i Muhammad. *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani, 2017.
- Tohir. *Wawancara*. Jombang. 26 Januari 2021.
- Wardi Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Aus AID. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kerjasama YLBHI DAN PSHK, 2017.
- Yazid Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz, 2017.